



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kompas | Sindo | Tempo |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Indopos | Pos Kota | Warta Kota |

DPRD Persoalkan Besarnya Sisa Anggaran Jakarta

Perombakan pejabat bertujuan mendorong perbaikan kinerja.

Avit Hidayat

avit.hidayat@tempo.co.id

JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mengkritik keras rendahnya penggunaan anggaran pemerintah DKI pada tahun lalu. Sejumlah fraksi bahkan menyebut

dibawah Gubernur Jakarta Anies Baswedan tak becus mengelola anggaran.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gembong Warsone mengatakan rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017 mendorong sisa le-

bih pembiayaan anggaran (silpa) atau anggaran tak terpakai hingga Rp 13,7 triliun. Dia khawatir kejadian serupa menimpa anggaran 2018.

"Apalagi serapan anggaran tahun ini juga masih rendah," kata Gembong kepada *Tempo*, kemarin.

Realisasi anggaran 2017 hanya Rp 51,05 triliun dari target Rp 61,81 sehingga jumlah silpa sebesar Rp 13,7 triliun. Artinya, persentase serapan hanya 82,59 persen dari minimum 90 persen. Padahal, pada 2016, silpa DKI cuma Rp 7 triliun. Sedangkan hingga sekarang penyerapan APBD 2018 baru mencapai 25 persen dari target sekitar Rp 70 triliun.

Sebelumnya, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rishi Abdullah, juga mengkritik rendahnya serapan anggaran tersebut. "Untuk sekelas DKI, hanya 82,59 persen, itu rendah. Sumber daya manusianya seharusnya profesional," ujarnya.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Taufiqurrahman menilai pengalokasian anggaran tidak terencana dengan baik sehingga realisasinya tersendat. "Kan, sayang loh duit tidak terpakai," ucap Taufiq.

Sejumlah fraksi lain turut mengkritik kinerja anak buah Anies Baswedan, seperti Partai Hanura, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Mereka meminta Anies memastikan kejacian serupa tak terulang dalam APBD 2018.

Gubernur Anies Baswedan menjawab kinerja buruk tersebut dengan melakukan perombakan besar-besaran pejabat, untuk meningkatkan kinerja pemerintah DKI. Sekitar 20 pejabat level

Program Unggulan Anies Atasi Jeblok Anggaran

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan meneguhkan realisasi program-program prioritas yang pernah disampaikan selama kampanye tahun lalu. Rencana kegiatan tersebut acalah rumah susun, program rumah *down payment* (DP) nol rupiah, pelatihan wirausaha OK Oke, transportasi OK Otrip, pendidikan, serta kesehatan.

Berikut ini rincian alokasi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) 2017 yang akan dialokasikan ke program prioritas 2018:

• Program DP Nol Rupiah

Program perumahan untuk masyarakat bawah ini akan menjadi perhatian pemerintah DKI pada tahun ini. Anies Baswedan bahkan merombak jajaran dinas perumahan untuk mendorong kinerja. Saat ini mereka bertokus pada pembiayaan skema layanan.

• OK OCE

Wakil Gubernur Sandiaga Uno menerangkan membuka lapangan kerja via program ini. OK OCE akan mendapat suntikan dana dari silpa 2017.

• OK Otrip

Pemerintah DKI merargetkan 2.000 angkutan umum, termasuk Metro Mini dan Kopaja, bergabung dalam program transportasi murah tersebut. OK Otrip juga mendapat suntikan anggaran dari silpa 2017 dan PSO PT Transjakarta (Transjakarta). Namun target sulit teralisasi karena terganjal birokrasi.

• KJP Plus

Anies Baswedan mengalokasikan Rp 3,9 triliun anggaran untuk peningkatan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, termasuk memfasilitasi 80 ribu anak dan remaja putus sekolah mencari pekerjaan dan sekolah.

• Kesehatan

Sebanyak 39 kegiatan di dinas kesehatan yang tak tepat sasaran bakal dievaluasi. Anggaran yang telah diukurkan bakal digeser untuk program kesehatan masyarakat.

• Program Rumah Susun

Tahun ini pemerintah DKI membangun sekitar 14 ribu rumah susun dan mencanangkan penghapusan denda biaya sewa rumah susun (pemukiman) bagi warga tak mampu. • AVIT HIDAYAT

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kompas | Sindo | Tempo |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Indopos | Pos Kota | Warta Kota |

DPRD Persoalkan Besarnya Sisa Anggaran Jakarta

pinpimian tinggi pertama, administrator, dan widyaiswara ahli utama diganti.

"Ini adalah peyegaran. Kami berharap mereka yang dilantik membawa kebaruan," katanya sesuai pelantikan pejabat baru kemarin. Menurut Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, tinggalnya silpa 2017 menjadi bahan evaluasi. Rencananya, dana silpa sebesar Rp 13,7 triliun bakal dialihkan ke program prioritas Anies-Sandi. Beberapa program yang berpotensi mendapat

suntikan dana adalah rumah susun, program rumah *down payment* (D1) nol rupiah, OK OCE, OK Otrip, pendicikan, kesehatan, kereta *mass rapid transit* (MRT) dan penanggulangan banjir.

Targetnya dianggarkan Rp 71,1 triliun pada APBD Perubahan 2013 untuk program-program tadi. "Nanti kami telap *bottom up*, kemudian dikonstruksikan di Bappeda."

Gembong meminta Anies lebih bertokus mengawal program kerja tahun ini.

Di sisi lain, banyak pejabat di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menungga sikap Anies terhadap sejumlah hal. Maka dia sepakat Gubernur Anies merombak besar-besaran jajaran pejabat DKI.

"(Gubernur DKI) sempat menyodoran beberapa nama untuk posisi strategis di pemerintahan."

Taufiq juga menilai kinerja SKPD asal-asalan. Dia mendesak Anies mengevaluasi menyeluruh kinerja pemerintahannya.

● AMT HIDAYAT | YUSUF MAHLUUNG